

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan keberhasilan dari kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana perintah daerah berwenang untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau lebih dikenal dengan desentralisasi. Kebijakan ini diharapkan daerah dapat membiayai pembangunan di daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom.

Pembangunan merupakan proses pengembangan semua sistem penyelenggaraan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat yaitu :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam pembangunan daerah tidak terlepas dari rencana, guna mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat mencapai optimal dan dengan pemerataan yang baik. Pembangunan ekonomi disuatu daerah akan tercapai dengan baik apabila di dasarkan pada suatu hal yang bersifat khusus di daerah tersebut yang bersangkutan dengan penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lembaga yang ada. Pemerintah daerah dan masyarakat harus berpartisipasi menargetkan potensi sumber daya yang paling berpengaruh disuatu daerah untuk pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk Pendapatan Asli Daerah dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Realisasi pelaksanaan otonomi daerah dengan sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber - sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan PAD merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan penerimaan pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.

Retribusi daerah memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 yaitu, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam

menggal potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara selain dari sektor migas yang sangat potensial dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian. Pemerintah sangat berharap bahwa sektor pariwisata akan mampu menjadi pengganti pemasok devisa utama setelah peran migas yang mengalami degradasi. Sebagai sektor nasional pariwisata mempunyai efek ganda yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata baik bersifat langsung berupa penyerapan tenaga kerja disektor pariwisata maupun dampak tidak langsung berupa berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, rumah makan, jasa transportasi dan lain-lain.

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Kendal Tahun 2015-2016

No	Jenis Penerimaan	2014		2015		2016	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Pajak daerah	66.000.000.000	28.8%	70.000.000.000	29.2%	84.800.000.000	31.9%
2	Retribusi daerah	18.350.000.000	8.0%	19.200.000.000	8.0%	21.800.000.000	8.3%
3	Bagian laba BUMD	127.550.000.000	55.6%	130.700.000.000	54.6%	134.200.000.000	50.6%
4	Penerimaan Lain	17.450.000.000	7.6%	19.600.000.000	8.2%	24.500.000.000	9.2%
Total PAD		229.350.000.000	100%	239.500.000.000	100%	265.300.000.000	100%

Sumber, dppad Kab. Kendal 2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun kontribusi sektor wisata di Kabupaten Kendal terbilang kecil terhadap pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Namun ini menjelaskan bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya PAD Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal salah satu yang memiliki sektor pariwisata yang baik dan strategis di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Kendal adalah Pemandian Air Panas Gonoharjo yang berada di Kecamatan Limbangan.

Obyek pariwisata Pemandian Air Panas Gonoharjo adalah salah satu sumber retribusi yang dihasilkan dari sektor pariwisata yang dihasilkan Kabupaten Kendal. Retribusi Pemandian Air Panas Gonoharjo berpotensi sebagai salah satu sumber yang memberikan sumbangan di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu Pemandian Air Panas Gonoharjo dikelola dengan baik agar tetap berperan memberikan sumbangan pada PAD Kabupaten Kendal

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditulis tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GONOHARJO KENDAL”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan tugas akhir (TA) ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal – hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan tidak menyimpang dari judul yang dipilih. Berdasarkan judul yang dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian yaitu :

1. Gambaran mengenai Retribusi Tempat Wisata
2. Dasar Pengenaan Retribusi Tempat Wisata
3. Kendala dalam pemungutan retribusi dan cara mengatasinya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pemungutan retribusi pada tempat wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan oleh pihak – pihak terkait penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

2. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Penulisan laporan ini sebagai tambahan referensi mengenai penerimaan retribusi daerah atas tempat wisata yang diharapkan dapat menambah informasi tentang pembelajaran berdasarkan kasus nyata di lapangan kerja.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian, dilakukan dengan :

1.4.1 Data Penelitian

Data yang didapatkan berupa:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data – data yang dikumpulkan tentang setoran retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari buku – buku, internet yang berhubungan dengan retribusi obyek wisata dan PAD.

1.4.2 Metode Pengambilan Data

Cara pengumpulan data dalam tugas akhir ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah observasi yang bersifat langsung dalam bentuk pertanyaan yang direncanakan guna memperoleh jawaban yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian (Aswarini Sujud, 1983 : 32).

Wawancara dengan Kepala Pengelola Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo dan bagian humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. (Gorys Keraf, 2001 : 162).

Kegiatan pengamatan langsung di Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo.

3. Studi Pustaka

Memperoleh informasi melalui buku – buku, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan retribusi obyek wisata.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pertama dijelaskan latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara memperoleh data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo, fasilitas yang tersedia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian umum retribusi, retribusi tempat wisata, dasar hukum retribusi, dasar hukum retribusi temat wisata, pemungutan retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo dan analisa penerimaan retribusi wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kendal.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini adalah bagian yang terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, dalam bab ini akan ditarik kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bagian – bagian sebelumnya.